PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Pengabdian No. 1 Telp. (0922) 2221001,2221002,2221005
Fax (0922) 2221505 E-Mail : Info@halbarkab.com, Halbarkab@yahoo.com
Website : www. Halbarkab.Com
J A I L O L O

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR : 111 /KPTS/ IX / 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RAN-HAM)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017 secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dimaksud;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini di anggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Rencana Aksi Naisional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang R.I Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor B Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undangundang Nomor 43 Tahun 1999;;
3. Undang-undang R.I Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ;
4. Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera selatan, Kabupaten kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore kepulauan di Privinsi Maluku utara;
5. Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang R.I Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuagan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabarana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, dengan susunan Keanggotaan Panitia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini di bebankan pada pos Anggaran Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkannya

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 14 September 2017

PEJABAT	PARAF
Ass.Bid.Pem & Adm.Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

An. BUPATI HALMAHERA BARAT
SEKRETARIS DAERAH

Drs. SYHARIL ABD. RADJAK, Msi
Pembina Utama Madya IV/d
Nip. 19660420 199203 1 009

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. *1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,*
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
7. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR :171/KPTS/ IX / 2017
TANGGAL : 14 September 2017

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN PANITIA KEGIATAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RAN-HAM) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017.

No.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONOR
1.	Bupati Halmahera Barat	Pembina	Rp. 2.000.000
2.	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pembina	Rp. 2.000.000
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah	Rp. 1.900.000
4.	Ass. Bid. Peme & Adm Umum	Koordinator	Rp. 1.800.000
5.	Ass. Bid. Eko Pemb & Kesra	Koordinator	Rp. 1.800.000
6.	Kabag Hukum & Organisasi	Ketua	Rp. 1.750.000
7.	Kasubag Perundang-undangan	Sekretaris	Rp. 1.000.000
8.	Fataha Idrus	Anggota	Rp. 500.000
9.	Feri Arumajaya	Anggota	Rp. 500.000
10.	Andi Nurhayati Syamsu	Anggota	Rp. 500.000
11.	Irawan S. Disi	Anggota	Rp. 500.000
12.	James S. Sumlang	Anggota	Rp. 500.000
13.	Fahria Abdullah	Anggota	Rp. 500.000
14.	Sri Wahyuni Yallow	Anggota	Rp. 500.000
15.	Bahtiar A. Kamis	Anggota	Rp. 500.000
16.	Ferawati Silalahi	Anggota	Rp. 500.000
17.	Rina Rauf	Pemegang kas	Rp. 500.000
18.	Mitto Danta	Anggota	Rp. 500.000
19.	Sance L. Lalu	Anggota	Rp. 500.000
20.	Novelina Luow	Anggota	Rp. 500.000
21.	Lin Roba	Anggota	Rp. 500.000
22.	Navratilova Latukolan	Anggota	Rp. 500.000
23.	Iskandar Zulkarnain	Anggota	Rp. 500.000
24.	Kartini Rondonuwu	Anggota	Rp. 500.000
25.	Suryani Tausi	Anggota	Rp. 500.000
26.	Iskandar M. Nur	Anggota	Rp. 500.000
27.	Annastasya N. Ludu	Anggota	Rp. 500.000

PEJABAT	PARAF
Ass.Bid.Pem & Adm.Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

An. BUPATI HALMAHERA BARAT
SEKRETARIS DAERAH

Drs. SYHARIL ABD. RADJAK, Msi
Pembina Utama Madya IV/d
Nip. 19660420 199203 1 009